

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada OPD Kota Solok

Puti Chintia Maharani¹, Witra Maison², Lili Wahyuni³
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin -¹putichintia@gmail.com
-²witramaison.02@gmail.com
-³lili_maksi@yahoo.co.id

Abstrak— *The Quality of Regional Government Financial Statements is one of the indicators of successful regional financial management and is influenced by several factors, including the implementation of Government Accounting Standards, the Regional Financial Accounting System, and the Internal Control System. This study aims to analyze the effect of the implementation of Government Accounting Standards, the Regional Financial Accounting System, and the Internal Control System on the Quality of Regional Government Financial Statements at Regional Apparatus Organizations (OPD) in Solok City. This study employed a quantitative approach with the population consisting of all Regional Apparatus Organizations in Solok City. The sampling technique used was total sampling, involving 72 respondents comprising heads of Regional Apparatus Organizations, treasurers, and financial staff. Primary data were collected through questionnaires using a five-point Likert scale. Data were analyzed using the Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) method. The results indicate that the implementation of Government Accounting Standards and the Regional Financial Accounting System has a positive effect on the Quality of Regional Government Financial Statements. Meanwhile, the Internal Control System has no effect on the Quality of Regional Government Financial Statements at Regional Apparatus Organizations in Solok City.*

Keywords: *Government Accounting Standards, Regional Financial Accounting System, Internal Control System, Quality of Regional Government Financial Statements*

1. PENDAHULUAN

Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua prinsip utama dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang berperan sebagai landasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas mencerminkan kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik serta pencapaian kinerja yang telah dilakukan kepada masyarakat. Sementara itu, transparansi menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk memperoleh informasi dan melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah (Mulyana & Herlina, 2021). Kedua prinsip tersebut diwujudkan melalui penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain menjadi media penyampaian informasi kepada para pemangku kepentingan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah juga menjadi dasar bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (Halim & Kusufi, 2020; Mahmudi, 2016)

Kualitas laporan keuangan menjadi salah satu indikator penting yang menggambarkan tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan yang berkualitas harus mampu menyediakan informasi yang relevan, memiliki tingkat keandalan yang baik, mudah dipahami, serta dapat dibandingkan antarperiode maupun antarentitas. Dengan demikian, informasi yang disajikan dapat menjadi dasar yang memadai bagi para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan (Yusri, 2024). Selain itu, kualitas laporan keuangan berperan dalam meningkatkan efektivitas evaluasi kinerja, penyusunan kebijakan, serta perencanaan anggaran pemerintah (Jati, 2019). Laporan keuangan yang berkualitas juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan publik sekaligus

memperkuat fungsi pengawasan oleh lembaga legislatif maupun auditor eksternal (Mardiasmo, 2018).

Walaupun memiliki peran yang strategis dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah masih menghadapi berbagai kendala, khususnya berkaitan dengan kompetensi aparatur serta pelaksanaan pengelolaan keuangan yang belum sepenuhnya optimal (Yusri, 2024). amun, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah menunjukkan perkembangan yang positif. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya persentase pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yaitu dari 89,5% pada tahun 2019 menjadi 90,3% pada tahun 2023 (Warta BPK, 2024). Salah satu pemerintah daerah yang berhasil mempertahankan capaian tersebut adalah Kota Solok, yang pada tahun 2025 kembali meraih opini WTP untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2016. Pencapaian tersebut menunjukkan adanya komitmen dan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan (Canang News, 2025). Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung, di antaranya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal. Ketiga aspek tersebut memiliki peran penting dalam menjamin bahwa proses pencatatan, pengelolaan, hingga penyajian laporan keuangan dilakukan sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku. Dengan penerapan yang baik, ketiga faktor tersebut diharapkan mampu menghasilkan laporan keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dipahami, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mencerminkan karakteristik kualitatif yang menunjukkan sejauh mana informasi keuangan yang disajikan mampu memberikan manfaat bagi para pengguna laporan keuangan (Jati, 2019). Laporan keuangan yang berkualitas harus menyediakan informasi yang memenuhi kriteria relevansi, keandalan, keterbandingan, dan keterpahaman, sehingga dapat menjadi dasar yang tepat dalam mendukung proses pengambilan keputusan. Informasi keuangan yang berkualitas juga memungkinkan berbagai pihak yang berkepentingan, baik pihak internal pemerintah maupun pengguna eksternal, untuk melakukan penilaian terhadap kinerja organisasi, mengevaluasi kondisi keuangan, memproyeksikan perkembangan keuangan di masa mendatang, serta memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Menurut Martyana (2024), kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat diukur melalui empat indikator utama, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan suatu pedoman yang memuat prinsip, dasar, dan ketentuan akuntansi yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan serta penyajian laporan keuangan pemerintah. Standar ini menjadi landasan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melaksanakan proses akuntansi dan pelaporan keuangan agar informasi yang dihasilkan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki peran penting dalam menjamin bahwa tahapan pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan pemerintah dilakukan secara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mampu menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas dan bermanfaat bagi pihak internal maupun eksternal pemerintah (Sulasmining & Alliyah, 2023). Dalam penelitian ini, pengukuran penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dilakukan melalui delapan indikator yang disusun berdasarkan prinsip dan ketentuan yang terdapat dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang optimal diyakini dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, karena standar tersebut menyediakan pedoman yang sistematis dalam pelaksanaan pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Jati (2019) menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, karena mampu meningkatkan kualitas informasi keuangan agar lebih relevan, andal, serta dapat dibandingkan antarperiode maupun antarentitas pemerintahan. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Yusri (2024), Handayani et al. (2025) serta Nurfauza & Rahayu (2020) yang menyatakan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, baik dalam hal penyajian, pengungkapan, maupun keandalan informasi keuangan yang dihasilkan. Namun demikian, hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh Standar Akuntansi

Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan masih menunjukkan adanya ketidakkonsistenan. Penelitian Harun (2021) serta Apriansyah et al. (2020) menemukan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Adanya perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan kualitas laporan keuangan masih memerlukan pengujian lebih lanjut pada konteks dan objek penelitian yang berbeda. Berdasarkan landasan teori serta hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan suatu rangkaian mekanisme yang terdiri atas berbagai komponen, prosedur, tahapan, perangkat, serta ketentuan yang digunakan dalam proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, hingga penyajian laporan transaksi keuangan daerah (Utami et al., 2020). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas transaksi keuangan pemerintah daerah dapat dicatat secara sistematis dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan memiliki tingkat akurasi, relevansi, dan akuntabilitas yang memadai. Keberadaan sistem akuntansi keuangan daerah yang efektif juga mendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Menurut Salsabilla (2024), pengukuran Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat dilakukan melalui tiga indikator, yaitu kesesuaian sistem akuntansi keuangan daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kesesuaian prosedur pencatatan akuntansi dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta penyajian laporan keuangan secara berkala.

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang optimal diyakini mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena sistem tersebut berperan dalam menghasilkan informasi keuangan yang akurat, lengkap, dan andal. Penelitian Salsabilla (2024) membuktikan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hasil tersebut diperkuat oleh penelitian Defitri (2018), Sanjaya (2017), Mokoginta et al. (2017), serta Binawati & Nindyaningsih (2022) yang menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda. Astuti et al. (2024) menemukan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, karena sistem yang diterapkan belum sepenuhnya mudah digunakan sehingga belum mampu mendukung proses pengolahan data keuangan secara optimal. Adanya perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan kualitas laporan keuangan masih perlu dikaji lebih lanjut. Berdasarkan uraian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu mekanisme pengendalian yang mencakup struktur organisasi, kebijakan, metode, serta prosedur yang dirancang dan dilaksanakan secara terintegrasi untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tujuan organisasi. Penerapan Sistem Pengendalian Internal bertujuan untuk menjaga keamanan aset, meningkatkan keakuratan dan keandalan informasi akuntansi, mendukung efektivitas serta efisiensi kegiatan operasional, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan maupun peraturan yang berlaku (Maslina, 2024). Dalam konteks pengelolaan keuangan pemerintah, Sistem Pengendalian Internal berperan penting dalam menjamin bahwa proses pengelolaan keuangan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Menurut Martyana (2024) pengukuran Sistem Pengendalian Internal terdiri atas lima indikator, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian internal.

Keberadaan Sistem Pengendalian Internal yang efektif diyakini mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena dapat meminimalkan kesalahan pencatatan, mencegah penyimpangan, serta meningkatkan keandalan informasi keuangan yang disajikan. Hasil penelitian Lesmana (2020) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif

dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, yang mengindikasikan bahwa semakin baik penerapan pengendalian internal, maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Arista et al. (2021), Sulasmining & Alliyah (2023), serta Ramdany & Hartono (2020) yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, hasil penelitian mengenai hubungan tersebut masih menunjukkan adanya perbedaan temuan. Penelitian Maslina (2024) serta Nurfaulza & Rahayu (2020) menemukan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan masih perlu dikaji lebih lanjut. Berdasarkan uraian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3: Penerapan Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

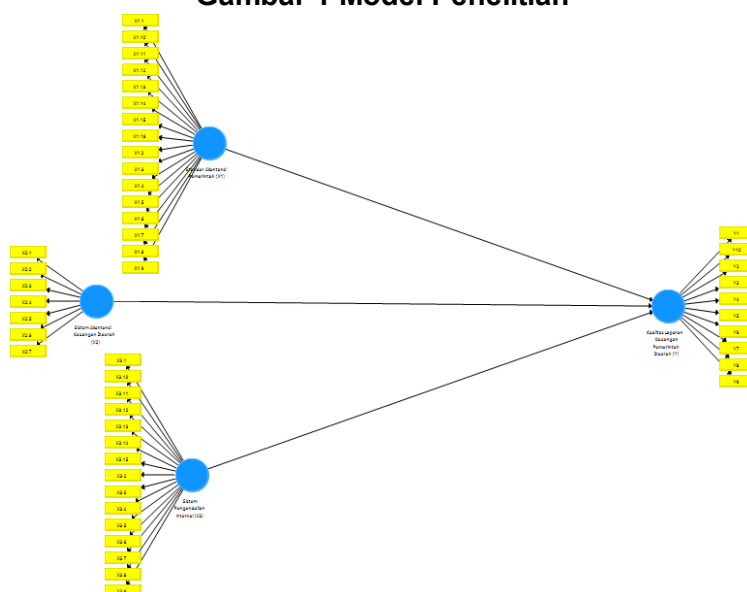
2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif yang bertujuan untuk menganalisis hubungan serta pengaruh antarvariabel dalam suatu model penelitian. Fokus penelitian ini adalah menguji pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Solok. Populasi penelitian terdiri atas kepala OPD, bendahara, dan staf bagian keuangan pada 26 Organisasi Perangkat Daerah di Kota Solok dengan jumlah populasi sebanyak 78 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling, sehingga seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian dengan skala Likert lima poin, di mana skor 1 menunjukkan kategori sangat tidak setuju dan skor 5 menunjukkan kategori sangat setuju. Kuesioner disusun untuk mengukur empat variabel penelitian, yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Analisis data dilakukan menggunakan metode *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan pendekatan *Partial Least Squares* (PLS). Metode SEM-PLS dipilih karena mampu menganalisis hubungan antarvariabel laten secara simultan, baik pada model pengukuran (*outer model*) maupun model struktural (*inner model*). *Outer model* digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, sedangkan *inner model* digunakan untuk mengevaluasi hubungan kausal antarvariabel serta menguji hipotesis penelitian. Dengan demikian, SEM-PLS mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antarvariabel sesuai dengan model konseptual yang dibangun dalam penelitian.

Gambar 1 Model Penelitian



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebanyak 78 kuesioner disebarikan kepada responden yang terdiri atas kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bendahara, dan staf bagian keuangan pada OPD Kota Solok. Dari jumlah tersebut, sebanyak 72 kuesioner berhasil dikembalikan dan dapat diolah, sedangkan 6 kuesioner tidak kembali karena responden tidak berada di tempat atau sedang melaksanakan tugas di luar kota pada saat pengumpulan data. Dengan demikian, tingkat pengembalian kuesioner dalam penelitian ini mencapai 92,31%, sehingga jumlah responden yang digunakan dalam analisis penelitian adalah sebanyak 72 orang. Karakteristik responden dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Karakteristik Responden

Karakteristik	Deskripsi	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	27	37,5%
	Perempuan	45	62,5%
	total	72	100%
Usia	20 - 30 thn	10	13,9%
	31 - 40 thn	20	27,8%
	41 - 50 thn	32	44,4%
	51 - 60 thn	10	13,9%
	Total	72	100%
Tingkat pendidikan	SMA	2	2,8%
	D3	4	5,6%
	S1	49	68,1%
	S2	16	22,2%
	S3	1	1,4%
	Total	72	100%
Lama bekerja	< 5 thn	10	13,9%
	5 - 10 thn	16	22,2%
	10 - 15 thn	12	16,7%
	> 15 thn	34	47,2%
	Total	72	100%

Sumber: data diolah 2026

Karakteristik responden dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran mengenai profil responden berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan lama bekerja. Berdasarkan Tabel 2, mayoritas responden berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 62,5%. Dari aspek usia, sebagian besar responden berada pada rentang usia 41–50 tahun dengan persentase sebesar 44,4%. Berdasarkan tingkat pendidikan, responden didominasi oleh lulusan Strata 1 (S1), yaitu sebesar 68,1%. Sementara itu, berdasarkan lama bekerja, mayoritas responden telah memiliki masa kerja lebih dari 15 tahun dengan persentase sebesar 47,2%. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan yang memadai serta pengalaman kerja yang cukup lama, sehingga dinilai memiliki pemahaman yang baik terhadap proses pengelolaan dan pelaporan keuangan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah

Uji Outer Model

Convergent Validity

Convergent validity digunakan untuk mengukur sejauh mana indikator-indikator dalam suatu konstruk memiliki tingkat korelasi yang tinggi sehingga mampu merepresentasikan konstruk yang diukur secara memadai. Pengujian *convergent validity* dilakukan dengan mengevaluasi nilai *loading factor* dan *Average Variance Extracted* (AVE). Suatu indikator dinyatakan memenuhi *convergent validity* apabila memiliki nilai *loading factor* lebih besar dari 0,70, sedangkan suatu konstruk dinyatakan valid apabila memiliki nilai AVE lebih besar dari 0,50. Hasil pengujian *convergent validity* pada penelitian ini disajikan pada Tabel 2 yang memuat nilai *loading factor* dan AVE untuk masing-masing konstruk penelitian.

Tabel 2 Nilai *Loading Factor* dan AVE

Variabel	Indikator	<i>Loading Factor</i>	AVE
Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)	X1.1	0,798	0,602
	X1.2	0,812	
	X1.3	0,791	
	X1.4	0,776	
	X1.6	0,840	
	X1.7	0,711	
	X1.9	0,788	
	X1.10	0,733	
	X1.11	0,724	
	X1.12	0,793	
	X1.15	0,713	
	X1.16	0,818	
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2)	X2.1	0,804	0,655
	X2.2	0,805	
	X2.3	0,802	
	X2.4	0,780	
	X2.5	0,844	
	X2.6	0,784	
	X2.7	0,841	
Sistem Pengendalian Internal (X3)	X3.1	0,795	0,638
	X3.2	0,817	
	X3.3	0,831	
	X3.4	0,783	
	X3.6	0,822	
	X3.7	0,836	
	X3.8	0,753	
	X3.9	0,778	
	X3.10	0,793	
	X3.12	0,776	
	X3.13	0,835	
	X3.14	0,832	
	X3.15	0,729	
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Y1	0,761	0,654
	Y2	0,817	
	Y3	0,838	
	Y4	0,780	
	Y8	0,833	
	Y9	0,794	
	Y10	0,835	

Sumber: data diolah 2026

Berdasarkan hasil pengujian *convergent validity*, ditemukan sembilan indikator yang belum memenuhi kriteria validitas karena memiliki nilai *loading factor* kurang dari 0,70. Indikator tersebut meliputi X1.5, X1.8, X1.13, X1.14, X3.5, X3.11, Y5, Y6, dan Y7. Oleh karena itu, kesembilan indikator tersebut dieliminasi dari model pengukuran karena tidak mampu merepresentasikan konstruk secara memadai. Setelah dilakukan penghapusan indikator yang tidak valid dan pengujian ulang model, seluruh indikator yang tersisa memiliki nilai *loading factor* di atas 0,70. Selain itu, berdasarkan Tabel 3, seluruh konstruk penelitian memperoleh nilai AVE lebih besar dari 0,50. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh konstruk telah memenuhi kriteria *convergent validity*, sehingga model pengukuran dinyatakan valid dan layak untuk digunakan pada tahap analisis selanjutnya.

Discriminant Validity

Discriminant validity dievaluasi melalui analisis *cross loading* untuk memastikan bahwa setiap indikator memiliki kemampuan yang baik dalam membedakan konstruk yang diukurnya dengan konstruk lainnya. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai *cross loading* setiap indikator pada konstruk asalnya dengan nilai *cross loading* terhadap konstruk lain. Suatu indikator dinyatakan memenuhi kriteria *discriminant validity* apabila nilai *cross loading* pada konstruk yang diukur merupakan yang tertinggi dan umumnya memiliki nilai *loading factor* di atas 0,70. Hasil pengujian

discriminant validity berdasarkan nilai *cross loading* untuk masing-masing indikator penelitian disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Nilai *Cross Loading*

Indikator	Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2)	Sistem Pengendalian Internal (X3)	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)
X1.1	0,798	0,569	0,598	0,682
X1.2	0,812	0,597	0,615	0,670
X1.3	0,791	0,641	0,588	0,621
X1.4	0,776	0,515	0,495	0,528
X1.6	0,840	0,585	0,599	0,597
X1.7	0,711	0,545	0,591	0,374
X1.9	0,788	0,542	0,549	0,589
X1.10	0,733	0,604	0,534	0,500
X1.11	0,724	0,569	0,551	0,582
X1.12	0,793	0,537	0,667	0,617
X1.15	0,713	0,588	0,563	0,483
X1.16	0,818	0,641	0,681	0,595
X2.1	0,658	0,804	0,549	0,588
X2.2	0,585	0,805	0,605	0,627
X2.3	0,606	0,802	0,602	0,540
X2.4	0,588	0,780	0,660	0,566
X2.5	0,677	0,844	0,630	0,608
X2.6	0,528	0,784	0,602	0,533
X2.7	0,566	0,841	0,607	0,629
X3.1	0,714	0,772	0,795	0,731
X3.2	0,476	0,543	0,817	0,439
X3.3	0,605	0,591	0,831	0,541
X3.4	0,722	0,787	0,783	0,725
X3.6	0,595	0,543	0,822	0,573
X3.7	0,539	0,565	0,836	0,518
X3.8	0,524	0,473	0,753	0,413
X3.9	0,571	0,524	0,778	0,423
X3.10	0,638	0,601	0,793	0,579
X3.12	0,513	0,447	0,776	0,510
X3.13	0,607	0,525	0,835	0,453
X3.14	0,598	0,631	0,832	0,575
X3.15	0,593	0,581	0,729	0,649
Y1	0,514	0,476	0,497	0,761
Y2	0,538	0,555	0,583	0,817
Y3	0,654	0,672	0,728	0,838
Y4	0,657	0,650	0,623	0,780
Y8	0,544	0,519	0,460	0,833
Y9	0,601	0,566	0,451	0,794
Y10	0,678	0,617	0,624	0,835

Sumber: data diolah 2026

Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan pada Tabel 4, seluruh indikator memiliki nilai *cross loading* tertinggi pada konstruk yang diukur dan masing-masing menunjukkan nilai lebih besar dari 0,70. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa setiap indikator mampu membedakan konstruk yang diukurnya dari konstruk lainnya dengan baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria *discriminant validity*, sehingga layak digunakan dalam analisis lebih lanjut.

Composite Reliability dan Cronbach's Alpha

Selanjutnya, dilakukan pengujian reliabilitas konstruk untuk mengetahui tingkat konsistensi internal dari indikator-indikator dalam mengukur setiap konstruk penelitian. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan nilai *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha* yang diperoleh dari blok indikator pengukuran konstruk. Suatu konstruk dapat dinyatakan memiliki reliabilitas yang baik apabila memenuhi kriteria nilai *Composite Reliability* lebih besar dari 0,70 dan nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70. Dengan demikian, konstruk yang memenuhi kriteria tersebut menunjukkan bahwa indikator-indikator yang digunakan memiliki tingkat konsistensi yang memadai

dalam merepresentasikan variabel laten yang diukur. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4 Nilai *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha*

Variabel	<i>Composite Reliability</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>
Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)	0,948	0,940
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2)	0,930	0,912
Sistem Pengendalian Internal (X3)	0,958	0,958
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	0,930	0,912

Sumber: data diolah 2026

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4, diketahui bahwa seluruh konstruk penelitian memiliki nilai *Composite Reliability* lebih besar dari 0,70 dan nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh konstruk telah memenuhi kriteria reliabilitas yang ditetapkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tingkat konsistensi internal yang baik dalam mengukur masing-masing konstruk.

Uji Inner Model

R-Square

Pengujian *R-Square* (R^2) dilakukan untuk mengetahui kemampuan model struktural dalam menjelaskan variasi pada variabel endogen berdasarkan pengaruh variabel eksogen yang terdapat dalam model penelitian. Nilai *R-Square* (R^2) menunjukkan seberapa besar proporsi varians variabel endogen yang mampu dijelaskan oleh variabel-variabel eksogen. Kriteria penilaian nilai *R-Square* mengacu pada *rule of thumb*, yaitu nilai R^2 sebesar 0,75 menunjukkan kemampuan prediksi model yang kuat, nilai 0,50 menunjukkan kemampuan prediksi yang sedang, dan nilai 0,25 menunjukkan kemampuan prediksi yang lemah. Hasil pengujian nilai *R-Square* (R^2) dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Nilai *R-Square*

Variabel	<i>R-Square</i>
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	0,638

Sumber: data diolah 2026

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 5, diketahui bahwa nilai *R-Square* (R^2) sebesar 0,638. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X1), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2), dan Sistem Pengendalian Internal (X3) mampu menjelaskan variasi pada variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) sebesar 63,8%. Sementara itu, sebesar 36,2% variasi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

Predictive Relevance (Q²)

Pengujian *Q-Square* (Q^2) dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan prediktif (*predictive relevance*) dari model struktural serta menilai sejauh mana model mampu menghasilkan estimasi terhadap variabel endogen. Nilai Q^2 yang lebih besar dari 0 menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang baik dan relevansi prediktif terhadap konstruk endogen yang diuji. Hasil pengujian nilai Q^2 disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6 Nilai Q^2

Variabel	Q^2
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	0,393

Sumber: data diolah, 2026

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 6, diketahui bahwa nilai Q^2 pada variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,393. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan prediktif yang baik (*predictive relevance*) karena nilai Q^2 yang diperoleh lebih besar dari 0. Dengan demikian, model struktural yang digunakan dalam penelitian ini dinilai mampu memprediksi variabel endogen secara memadai.

Model Fit

Pengujian Model Fit dilakukan untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian antara model penelitian yang dikembangkan dengan data empiris yang diperoleh. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana model struktural mampu merepresentasikan hubungan antarvariabel berdasarkan data penelitian. Evaluasi Model Fit dalam penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan nilai *Normed Fit Index* (NFI) dan *Standardized Root Mean Square Residual* (SRMR) sebagai indikator penilaian kesesuaian model. Berikut disajikan tabel model fit pada tabel 7 berikut.

Tabel 7 Nilai Model Fit

	<i>Saturated model</i>	<i>Estimated model</i>
SRMR	0,092	0,092
NFI	0,480	0,480

Sumber: data diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 7, diketahui bahwa nilai SRMR pada *saturated model* dan *estimated model* sebesar 0,092, yang menunjukkan bahwa model telah memenuhi kriteria model fit karena berada di bawah nilai batas 0,10. Selanjutnya, nilai NFI pada kedua model diperoleh sebesar 0,480, yang menunjukkan tingkat kesesuaian model dalam kategori moderat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model penelitian memiliki tingkat kesesuaian yang memadai dan mampu merepresentasikan hubungan antarvariabel yang diuji.

Effect Size (f^2)

Pengujian *Effect Size* (f^2) dilakukan untuk mengetahui besarnya kontribusi atau pengaruh masing-masing variabel eksogen terhadap variabel endogen dalam model struktural. Nilai f^2 tidak hanya menunjukkan keberadaan pengaruh secara statistik, tetapi juga menggambarkan tingkat pengaruh secara substantif dari suatu konstruk terhadap konstruk lainnya. Kriteria penilaian *effect size* mengacu pada nilai 0,02 yang menunjukkan pengaruh kecil, 0,15 menunjukkan pengaruh sedang, dan 0,35 menunjukkan pengaruh besar. Hasil pengujian *Effect Size* (f^2) dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8 Nilai f^2

Variabel	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)
Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)	0,135
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2)	0,083
Sistem Pengendalian Internal (X3)	0,045

Sumber: data diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 8, diketahui bahwa variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) memiliki nilai *effect size* sebesar 0,135, yang menunjukkan pengaruh kecil terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) karena berada di antara 0,02 dan 0,15. Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) memperoleh nilai f^2 sebesar 0,083, yang juga menunjukkan pengaruh kecil terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, variabel Sistem Pengendalian Internal (X3) memiliki nilai f^2 sebesar 0,045, yang menunjukkan pengaruh kecil. Dengan demikian, seluruh variabel eksogen dalam penelitian ini memberikan kontribusi dengan kategori pengaruh kecil terhadap variabel endogen.

Path Coefficient

Dalam penelitian ini, pengujian *Path Coefficient* dilakukan untuk menganalisis hubungan struktural antarvariabel dalam model penelitian, baik pengaruh langsung maupun tidak langsung dari variabel eksogen terhadap variabel endogen. Tingkat signifikansi hubungan antarvariabel dalam model struktural ditentukan berdasarkan nilai *t-statistic* dan *p-value*, dengan kriteria penerimaan pengaruh apabila nilai *t-statistic* > 1,96 dan *p-value* < 0,05. Hasil pengujian pengaruh langsung (*direct effect*) antarvariabel penelitian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 9 Hasil Pengujian Pengaruh Langsung (Direct Effect)

	Keterangan	Original Sample	T-Statistics	P Values	Hasil Hipotesis
H1	Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) -> Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	0,369	1,975	0,049	Diterima
H2	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) -> Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	0,287	1,990	0,047	Diterima
H3	Sistem Pengendalian Internal (X3) -> Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	0,217	0,991	0,322	Ditolak

Sumber: data diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 9 di atas, hasil pengujian pengaruh langsung untuk setiap variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Hasil uji untuk variabel standar akuntansi pemerintahan (X1) menunjukkan bahwa nilai t-statistik sebesar $1,975 > 1,96$, dengan nilai *p-value* sebesar $0,049 < 0,05$. dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil ini, hipotesis 1 dapat diterima.
- b. Hasil uji untuk variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X2) menunjukkan bahwa nilai t-statistik sebesar $1,990 > 1,96$, dengan nilai *p-value* sebesar $0,047 < 0,05$. dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil ini, hipotesis 2 dapat diterima.
- c. Hasil uji untuk variabel sistem pengendalian internal (X3) menunjukkan bahwa nilai t-statistik sebesar $0,991 < 1,96$, dengan nilai *p-value* sebesar $0,322 > 0,05$. dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil ini, hipotesis 3 ditolak.

Pembahasan

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa H1 diterima, yang menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Solok. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada OPD Kota Solok telah berjalan dengan baik. Semakin optimal penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

Standar Akuntansi Pemerintahan berperan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses akuntansi pemerintah, mulai dari pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, hingga pengungkapan transaksi keuangan. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang konsisten mampu memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Selain itu, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang baik juga berkontribusi dalam meningkatkan ketepatan informasi keuangan, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jati (2019), Yusri (2024) serta Handayani et al. (2025) yang menyatakan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Harun (2021) yang menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Perbedaan hasil penelitian tersebut dapat disebabkan oleh adanya perbedaan karakteristik responden, kompetensi sumber daya manusia, tingkat pemahaman dan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan, serta kondisi kelembagaan pada masing-masing pemerintah daerah.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa H2 diterima, yang menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Solok. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada OPD Kota Solok telah berjalan secara optimal. Dengan demikian, semakin baik penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki peran penting sebagai mekanisme yang mengatur rangkaian proses pengelolaan transaksi keuangan, mulai dari identifikasi, pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, hingga penyusunan laporan keuangan. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang baik mampu menghasilkan informasi keuangan yang akurat, tepat waktu, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, sistem akuntansi yang diterapkan secara optimal dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, mengurangi potensi kesalahan dalam pencatatan transaksi, serta mendukung penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penelitian ini mengindikasikan bahwa implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada OPD Kota Solok telah mampu mendukung

proses pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien. Penerapan sistem yang baik mempermudah aparaturnya dalam melakukan pengelolaan transaksi, rekonsiliasi data keuangan, serta penyusunan laporan secara tepat waktu, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Salsabilla (2024) yang menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Astuti et al. (2024) yang menemukan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Perbedaan hasil penelitian tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti karakteristik organisasi, kesiapan infrastruktur teknologi informasi, kompetensi aparaturnya pengelola keuangan, serta tingkat optimalisasi penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada masing-masing pemerintah daerah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (X3) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa H3 ditolak, yang menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Solok. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Internal pada OPD Kota Solok belum mampu memberikan pengaruh secara signifikan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Meskipun Sistem Pengendalian Internal memiliki peran penting dalam menjaga keamanan aset, meningkatkan keandalan informasi keuangan, mendukung efisiensi operasional, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, keberadaan Sistem Pengendalian Internal belum sepenuhnya menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena kualitas laporan keuangan juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Tidak berpengaruhnya Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan juga dapat menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal pada OPD Kota Solok telah dilaksanakan secara relatif merata, sehingga belum menjadi faktor pembeda dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan antarorganisasi perangkat daerah. Selain itu, setiap unsur dalam Sistem Pengendalian Internal kemungkinan belum diimplementasikan secara optimal, sehingga keberadaan sistem pengendalian internal secara formal belum cukup untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan apabila tidak didukung oleh efektivitas pelaksanaan pengendalian, kompetensi aparaturnya, serta sistem akuntansi yang memadai.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Maslina (2024) yang menemukan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Arista et al. (2021) yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan hasil penelitian tersebut dapat disebabkan oleh adanya variasi karakteristik organisasi, tingkat efektivitas implementasi Sistem Pengendalian Internal, kompetensi sumber daya manusia, serta optimalisasi sistem akuntansi yang diterapkan pada masing-masing pemerintah daerah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Solok. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi yang sesuai dengan ketentuan serta sistem akuntansi keuangan daerah yang berjalan secara optimal mampu menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat, andal, transparan, dan akuntabel. Sebaliknya, Sistem Pengendalian Internal belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga masih diperlukan upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya agar dapat mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah secara lebih baik.

Berdasarkan temuan tersebut, Pemerintah Kota Solok diharapkan terus memperkuat penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah melalui peningkatan kompetensi aparaturnya pengelola keuangan, pembinaan yang berkelanjutan, serta monitoring dan

evaluasi terhadap kepatuhan dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, efektivitas Sistem Pengendalian Internal perlu ditingkatkan agar tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengawasan, tetapi juga mampu mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, seperti Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, serta memperluas objek penelitian agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif dan memiliki tingkat generalisasi yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriansyah, H., Rahayu, S., & Erwati, M. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo. *Jambi Accounting Review (JAR)*, 1(1), 44–62. <https://doi.org/10.22437/jar.v1i1.10944>
- Arista, D., Ziah, S. U., Eprianto, I., Kuntandi, C., & Pramukty, R. (2021). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Krisna*, 2, 1719–1729. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna/article/view/1941%0Ahttps://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna/article/download/1941/2019>
- Astuti, M., Wulandari, R., & Setyowati, S. W. (2024). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern , Sistem Akuntansi Keuangan Daerah , dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang*. 1(4), 1–8.
- Binawati, E., & Nindyaningsih, C. T. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Dinas-Dinas Skpd di Kabupaten Klat. *Optimal*, 19(1), 19–39.
- Canang News. (2025). *Kota Solok Raih Opini WTP Sembilan Kali Berturut Turut Sejak Tahun 2016*.
- Defitri, S. Y. (2018). *Pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah*. 3(1), 64–75.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2020). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Salemba Empat.
- Handayani, S., Annisa Rosyida, I., & Fitriyatul Bilgies, A. (2025). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Standar Akuntansi Pemerintahan , Dan Sistem Factors That Influence The Quality Of Regional Government Financial Reports. *Multidiciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 2(1), 529–539.
- Harun, M. I. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. *JURNAL SAINS, SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH)*, 1(1), 83–99. <https://doi.org/10.52046/jssh.v1i1.737>
- Jati, B. P. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi & Akuntansi*, 21(1).
- Lesmana, H. (2020). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kelurahan Pasarbatang. *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi (JASIKA)*, 1(1), 29–37. <http://jurnal.bsi.ac.id/index.php/jasika>
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik (Revisi Edisi Keempat)*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik: Edisi Terbaru*. Penerbit ANDI.
- Martyana, I. (2024). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024). *Universitas Telkom*.
- Maslina. (2024). Pengaruh Sistem Keuangan Daerah Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang. *Institut Agama Islam Negeri ParePare*.
- Mokoginta, N., Lambey, L., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 874–890.

- Mulyana, B., & Herlina, H. (2021). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2).
- Nurfauza, A., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan (Studi pada SKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020). *Jurnal Universitas Telkom*.
- Ramdany, & Hartono. (2020). Pengaruh Sap, Pengendalian Intern Dan Kompetensi Sdm Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 14–23.
- Salsabilla. (2024). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Kabupaten Bogor Dan Kota Bekasi)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Sanjaya, A. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi (Studi pada SKPD Ka. Jom Fekon, 4(1).
- Sulasmining, & Aliyah, S. (2023). The Effect of Internal Control, Human Resources and Utilization of Accounting Information Technology on the Quality of Financial Statements of Savings and Loans Cooperatives in Rembang Regency. *Jurnal Inovasi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 153–163. <http://journal.al-matani.com/index.php/invest/index>
- Utami, N. P. S., Merta, I. W. G., & Manuaba, I. . M. P. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan , Pengendalian Internal dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 1(3), 42–47.
- Warta BPK. (2024). *Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Alami Peningkatan*. <https://warta.bpk.go.id/kualitas-laporan-keuangan-pemerintah-daerah-alami-peningkatan/>
- Yusri, S. A. (2024). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare. *Institut Agama Islam Negeri ParePare*, February, 4–6.